

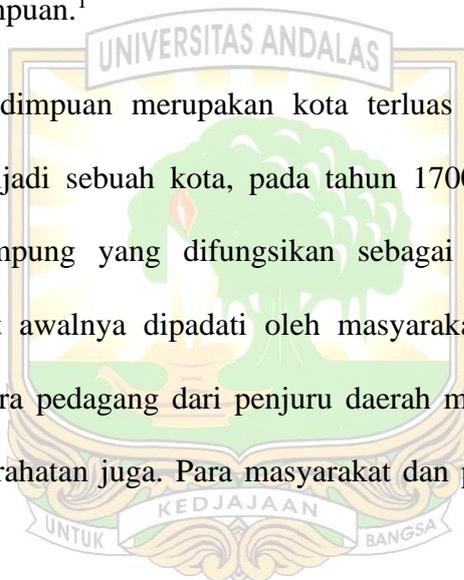
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebuah kota terbentuk melalui suatu proses dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Selain proses pertumbuhan dan perkembangan sebuah kota oleh masyarakat setempat, pemerintah kota juga memegang kendali terkait pembangunan dan perubahan tata ruang kota. Dengan demikian, tata ruang sebuah kota tidak terlepas dari kebijakan pemerintah setempat. Hal demikian juga dialami oleh Kota Padangsidempuan.¹

Kota Padangsidempuan merupakan kota terluas di wilayah Tapanuli.² Namun, sebelum menjadi sebuah kota, pada tahun 1700-an, Padangsidempuan hanyalah sebuah kampung yang difungsikan sebagai tempat peristirahatan. Peristirahatan tersebut awalnya dipadati oleh masyarakat biasa, tetapi seiring berjalannya waktu, para pedagang dari penjuru daerah memanfaatkan lokasi ini sebagai tempat peristirahatan juga. Para masyarakat dan pedagang menyebutnya



¹ Penulisan dari Kota Padangsidempuan beragam, seperti, “Padangsidempuan”, “Padang Sidempuan”, “Padangsidempuan”, dan “Padang Sidempuan”. Namun, secara resmi, penulisan kota ini akan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2023, peraturan penulisan yang berlaku terdapat dalam *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara*, yaitu, pasal 7 (a) penyebutan atau penulisan Padang Sidempuan dalam dokumen kependudukan dan catatan sipil serta dokumen lainnya yang bersifat masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya; dan (b) penggunaan nomenklatur Kota Padangsidempuan di lingkungan instansi pemerintah dan swasta dilakukan secara bertahap. Melalui Undang-Undang ini, nama dan penulisan kota ini secara resmi ditetapkan sebagai Padangsidempuan.

² Cory Patricia Siahaan, *Sejarah Padangsidempuan Dijuluki Sebagai Kota Salak*, 2023, (<https://www.detik.com/sumut/budaya/d-7322355/sejarah-padangsidempuan-dijuluki-sebagai-kota-salak>), diakses tanggal 12 Mei 2024).

Padang Nadimpu yang berarti tanah lapang luas yang tinggi, kata inilah yang merupakan asal kata dari Padangsidimpuan.³

Kota Padangsidimpuan menarik untuk dikaji. Kota ini telah ada sejak masa Perang Paderi, yaitu ketika Tuanku Lelo, seorang pemimpin Paderi membangun benteng di kawasan ini.⁴ Setelah berakhirnya kekuasaan Paderi, kawasan ini dikuasai oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Pada tahun 1837, Padangsidimpuan berada dalam wilayah *Afdeeling* Mandailing *en* Ankola yang merupakan bagian dari *Noordelijke Residentie* (Karesidenan Bagian Utara) dengan ibu kota di Air Bangis dan berada dalam *Gouvernement van Sumatra's Westkust* (Pemerintahan Pesisir Barat Sumatra). Pada akhir tahun 1842, *Gouvernement van Sumatra's Westkust* melakukan reorganisasi, yaitu dihapuskannya *Noordelijke Residentie* dan dibentuknya *Tapanoeli Residentie* (Karesidenan Tapanuli), dan Padangsidimpuan menjadi bagian Karesidenan Tapanuli. Pada tahun 1883, Ibu Kota Karesidenan Tapanuli mengalami perpindahan dari Sibolga ke Padangsidimpuan. Hal ini berlangsung hingga dikeluarkannya Karesidenan Tapanuli dari *Gouvernement Sumatra's Westkust*

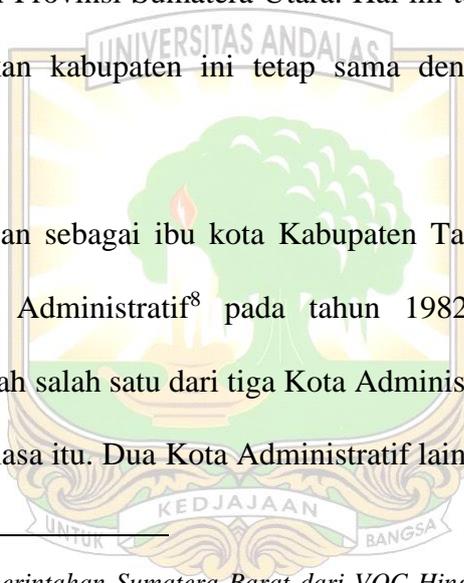
³ Budi P. Hutasuhut, *Historiografi Padang Sidimpuan* (Pustaka: Padangsidimpuan, 2022), hlm. 54.

⁴ Pemerintah Kota Padangsidimpuan, *Padangsidimpuan Dalam Angka Tahun 2004* (Padangsidimpuan: Badan Pusat Statistik, 2005), hlm. xxviii.

pada tahun 1905.⁵ Hal ini juga merupakan salah satu faktor terbentuknya *Afdeeling* Padangsidimpuan tahun 1906.⁶

Afdeeling Padangsidimpuan berkedudukan di Padangsidimpuan. Wilayah *afdeeling* dewasa ini mencakup Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas, dan Kabupaten Padang Lawas Utara. Setelah kekuasaan kolonial berakhir, *Afdeeling* Padangsidimpuan diubah menjadi Kabupaten Tapanuli Selatan Selatan yang merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Hal ini terjadi pada tahun 1956, wilayah dan kedudukan kabupaten ini tetap sama dengan wilayah *afdeeling* Padangsidimpuan.⁷

Padangsidimpuan sebagai ibu kota Kabupaten Tapanuli Selatan berubah status menjadi Kota Administratif⁸ pada tahun 1982.⁹ Kota Administratif Padangsidimpuan adalah salah satu dari tiga Kota Administratif di Sumatera Utara yang terbentuk pada masa itu. Dua Kota Administratif lainnya adalah Kisaran dan



⁵ Gusti Asnan, *Pemerintahan Sumatera Barat dari VOC Hingga Reformasi* (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2006), hlm. 66.

⁶ Dendy Reza Juliansyah, “*Afdeeling* Padang Sidempoean Tahun 1906-1942”, *Skripsi* (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2021), hlm. 54.

⁷ Lihat *Undang-Undang Daruruaat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Utara*.

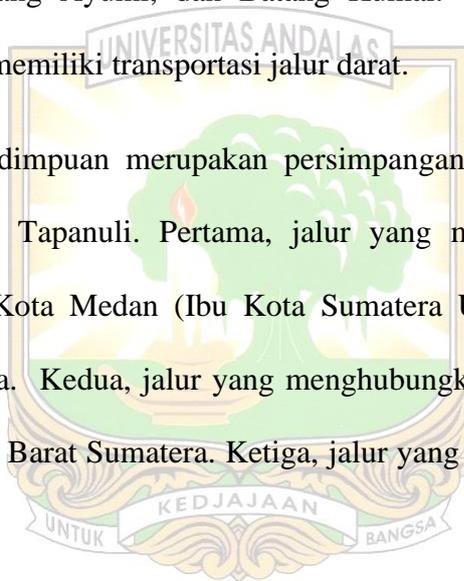
⁸ Berdasarkan *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah* dijelaskan bahawa pada masa itu wilayah Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu Wilayah Tingkat I dan Wilayah Tingkat II. Wilayah Tingkat I adalah daerah Provinsi dan Wilayah Tingkat II adalah Kabupaten dan Kotamadya. Kemudian, Kota Administratif adalah sebuah wilayah yang merupakan bagian Wilayah Tingkat II. Kota Administratif atau disebut dengan Kotif memiliki wilayah tersendiri berupa kecamatan dan desa. Kotif tidak memiliki DPRD karena masih bagian kabupaten, tetapi memiliki pejabat pemerintah yang disebut Wali Kota Administratif dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

⁹ Lihat *Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kota Administratif Padang Sidempuan*.

Rantau Prapat. Pada tahun 1999, Kota Administratif dihapuskan.¹⁰ Kota Administratif Kisaran dan Rantau Prapat bergabung kembali dengan kabupaten induknya,¹¹ sedangkan Kota Administratif Padangsidempuan mengalami peningkatan status menjadi Kota Otonom Padangsidempuan pada tahun 2001.¹²

Kota Padangsidempuan terletak di Pegunungan Bukit Barisan dan termasuk daerah dataran tinggi Tapanuli. Kota ini diapit oleh Gunung Lubuk Raya dan *Tor*¹³ Sanggarudang. Kota ini juga dialiri oleh tiga sungai besar, yaitu Sungai Batang Angkola, Batang Ayumi, dan Batang Kumal.¹⁴ Sebagai kota dataran tinggi, kota ini hanya memiliki transportasi jalur darat.

Kota Padangsidempuan merupakan persimpangan tiga jalur darat lintas tengah dataran tinggi Tapanuli. Pertama, jalur yang menghubungkan daerah Tapanuli Selatan ke Kota Medan (Ibu Kota Sumatera Utara) yang terletak di Pantai Timur Sumatera. Kedua, jalur yang menghubungkannya ke Kota Sibolga yang terletak di Pantai Barat Sumatera. Ketiga, jalur yang menghubungkannya ke



¹⁰ Lihat *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah*.

¹¹ Lihat *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 tahun 2003 tentang Penghapusan Kota Administrasi Kisaran, Kota Administratif Rantau Prapat, Kota Administratif Batu Raja, Kota Administratif Cilacap, Kota Administratif Purwokerto, Kota Administratif Klaten, Kota Administratif Jember, dan Kota Administratif Watampone*. Penjelasan “Kota Administratif yang memenuhi ketentuan sudah harus berubah statusnya menjadi Kota dan yang tidak memenuhi ketentuan dapat dihapus. Dalam kenyataannya terdapat Kota Administratif yang tidak memenuhi ketentuan menjadi daerah Kota yaitu Kota Administratif Kisaran (Kabupaten Asahan), Kota Administratif Rantau Prapat (Kabupaten Labuhan Batu)...”

¹² Lihat *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padang Sidempuan*.

¹³ *Tor* adalah bukit/gunung dalam Bahasa Batak.

¹⁴ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padangsidempuan, *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padangsidempuan (RPJP) Tahun 2005-2025*, (Padangsidempuan: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2008), hlm. 16.

Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat. Titik jalur ini terletak di pusat Kota Padangsidempuan, yaitu di bundaran Tugu Perjuangan Siborang.

Sejak menjadi Kota Otonom pada tahun 2001, terjadi perubahan besar di Kota Padangsidempuan, seperti penambahan luas wilayah yang diiringi dengan penambahan penduduk. Bertambahnya penduduk diiringi dengan penambahan fasilitas kota untuk mendukung masyarakat, seperti Pasar Ucok Kodok (2001), Pasar Raya Sangkumpal Bonang (2004), *Plaza Anugerah* (2008), dan Sidempuan *City Walk* (2008) di pusat kota; ruang publik seperti alun-alun kota (2004) dan taman tugu salak (2005). Selain itu, pembangunan jalan lingkar luar juga merubah bentuk dan pergerakan kota. Oleh karena itu, pembangunan fasilitas tersebut serta-merta mengubah morfologi Kota Padangsidempuan.¹⁵

Topik perubahan morfologi Kota Padangsidempuan selama tiga dekade (1982-2012) menarik untuk dikaji. Selama tiga dekade, status Kota Padangsidempuan mengalami perubahan, yaitu sebagai Kota Administratif (1982-2001) yang mengalami peningkatan status menjadi Kota Otonom Padangsidempuan pada tahun 2001 dan dibatasi hingga tahun 2012. Perubahan morfologi Kota Padangsidempuan sejalan dengan status pemerintahan yang berubah. Penelitian ini akan memperlihatkan hubungan timbal balik perubahan fisik kota dengan masyarakat yang mendiami kota. Dengan demikian, penelitian ini diberi judul “Perubahan Morfologi Kota Padangsidempuan Sebelum dan Sesudah Menjadi Kota Otonom (1982-2012)”.

¹⁵ *Wawancara* dengan Drs. Zulkarnain Nasution, M.M., selaku Wali Kota Administratif Padangsidempuan (1997-2001) dan Wali Kota I Padangsidempuan (2001-2012), Padangsidempuan, 5 Maret 2024.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Penelitian tentang Perubahan Morfologi Kota Padangsidempuan selama tiga dekade (1982–2012) memiliki dua batasan yaitu, batasan spasial dan batasan temporal. Batasan spasial adalah Kota Padangsidempuan yang berada di Sumatera Utara. Pada masa kota administratif (1982-2001), kota ini hanya meliputi Kecamatan Padangsidempuan Utara dan Kecamatan Padangsidempuan Selatan. Setelah menjadi kota otonom (2001-2012), kota ini meliputi Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, dan Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu.¹⁶

Batasan temporal penelitian ini adalah tahun 1982–2012. Pada tiga dekade ini, terdapat dua sistem pemerintahan kota yang berbeda, yaitu Kota Administratif Padangsidempuan (1982-2001). Kota administratif adalah sebuah kota yang masih di bawah kabupaten induknya, dengan kata lain kota ini belum memiliki wewenang untuk mengurus daerahnya sendiri, sedangkan Kota Otonom Padangsidempuan (2001-2012) memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Pemilihan tahun 2012 sebagai tahun akhir dikarenakan pada tahun ini merupakan tahun berakhirnya masa jabatan Drs. Zulkarnaen Nasution, M.M. sebagai Wali Kota I Padangsidempuan (2001-2012), selain itu, Beliau menjabat sebagai Wali Kota Administratif Padangsidempuan (1997-2001), sehingga melalui hal itu dapat dilihat perubahan morfologi Kota

¹⁶ Badan Pusat Statistik Kota Padangsidempuan, *Kota Padangsidempuan Dalam Angka 2006* (Padangsidempuan: Badan Pusat Statistik Kota Padangsidempuan, 2007).

Padangsidempuan sebelum dan sesudah menjadi kota otonom. Pada masa kebijakan Wali Kota ini juga, investasi di Kota Padangsidempuan dibuka, sehingga munculnya bangunan-bangunan swasta.¹⁷

Dalam memperjelas permasalahan, maka penelitian ini dirinci dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Mengapa perubahan struktur pemerintah Kota Administratif Padangsidempuan menjadi Kota Otonom Padangsidempuan mempengaruhi morfologi kota?
2. Bagaimana perubahan morfologi Kota Padangsidempuan selama tiga dekade, sejak tahun 1982 sampai tahun 2012?
3. Bagaimana dampak perubahan morfologi kota terhadap masyarakat Kota Padangsidempuan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagaimana dirumuskan berdasarkan pertanyaan penelitian sebelumnya, adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan pengaruh perubahan struktur pemerintah Kota Administratif Padangsidempuan menjadi Kota Otonom Padangsidempuan terhadap morfologi kota.
2. Mendeskripsikan perubahan morfologi Kota Padangsidempuan selama tiga dekade, yaitu tahun 1982-2012.

¹⁷ *Wawancara* dengan Drs. Zulkarnain Nasution, M.M., selaku Wali Kota Administratif Padangsidempuan (1997-2001) dan Wali Kota I Padangsidempuan (2001-2012), Padangsidempuan, 5 Maret 2024.

3. Menganalisis hubungan timbal-balik antara perubahan morfologi kota dengan kehidupan masyarakat Kota Padangsidempuan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat terhadap pengembangan suatu kawasan kota di Indonesia terutama Kota Padangsidempuan. Melalui penelitian ini, suatu kawasan kota dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahannya. Dengan demikian, kekuatan tersebut dapat ditingkatkan dan kelemahan dapat dihindari atau diminimalisasi. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, masyarakat, serta pemerintah.

D. Tinjauan Pustaka

Peneliti melakukan studi pustaka dan menemukan beberapa tulisan yang relevan. Tulisan terdahulu yang relevan dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini yang menyumbangkan ide teoritis dan konseptual dalam penelitian penulis. Referensi ini juga memperlihatkan perbandingan dengan tulisan terdahulu dan pembaharuan penelitian yang akan penulis lakukan. Berikut adalah referensi ditemukan untuk penelitian ini.

Buku “Struktur Tata Ruang Kota” karya Hadi Sabari Yunus.¹⁸ Salah satu bab dalam buku ini mendiskusikan Pendekatan Morfologi Kota (*Urban Morphological Approach*). Bab ini memaparkan bentuk-bentuk kota, ekspresi ruang kota, konsep morfologi kota, hingga unsur-unsur morfologi kota. Buku ini mendeskripsikan hubungan timbal-balik perubahan morfologi kota dengan masyarakat.

¹⁸ Hadi Sabari Yunus, *Struktur Tata Ruang Kota* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005).

Buku “Pengantar Sejarah Kota” karya Purnawan Basundoro.¹⁹ Buku ini memaparkan aspek teoritis tentang kota dan perkembangan awal suatu kota di dunia, terutama di Indonesia. Buku ini memaparkan bagaimana ciri kota tradisional, kolonial, hingga kota modern saat ini. Buku ini juga menjelaskan hubungan timbal-balik kota dengan pemerintah, ekonomi, pemukiman, hingga konflik yang terjadi dalam ruang kota.

Buku “Pemerintah Kota Padangsidempuan Menghadapi Tantangan Zaman” karya Basyral Hamidy Harahap.²⁰ Buku ini adalah buku yang mendeskripsikan sejarah Kota Padangsidempuan, yaitu sejak berdirinya benteng Padangsidempuan pada masa Perang Paderi, Padangsidempuan pada masa kolonial, hingga perjuangan pembentukan Padangsidempuan menjadi sebuah Kota Otonom. Buku ini menyumbangkan banyak ide kepada penulis untuk penelitian ini, terutama terkait perubahan struktur pemerintahan Padangsidempuan. Perbedaan buku ini dengan penelitian penulis, yaitu pada buku ini penulis tidak menjelaskan perubahan morfologi Kota Padangsidempuan.

Buku “Historiografi Padang Sidempuan” oleh Budi P. Hutasuhut.²¹ Buku ini mendeskripsikan sejarah Padangsidempuan mulai dari masa tradisional, kolonial, hingga pemerintah kota. Penulisan sejarah ini ditulis sang penulis dengan merincikan tulisannya dalam bidang sosial-budaya masyarakat Padangsidempuan. Buku ini juga menjelaskan bagaimana peralihan aset antara

¹⁹ Purnawan Basundoro, *Pengantar Sejarah Kota* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012).

²⁰ Basyral Hamidy Harahap, *Pemerintah Kota Padangsidempuan Menghadapi Tantangan Zaman* (Padangsidempuan: Pemerintah Kota Padangsidempuan, 2003).

²¹ Budi P. Hutasuhut, *Historiografi Padang Sidempuan* (Padangsidempuan: Penerbit Pustaka, 2022).

Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kota Padangsidempuan yang tak kunjung usai. Perbedaan buku ini dengan penelitian penulis, yaitu buku ini tidak menjelaskan perubahan morfologi atau pembangunan fasilitas kota.

Tesis “Kajian Pengaruh Pembangunan Jalan Lingkar Luar (*Outer Ring Road*) Terhadap Pola dan Struktur Ruang Kota (Studi Kasus: Kota Padangsidempuan)” oleh M. Yani.²² Tesis ini meneliti perubahan tata ruang kota Padangsidempuan akibat pembangunan jalan lingkar luar (*Outer Ring Road*). Tesis ini menyumbangkan ide terkait konsep tata ruang kota, pengalihfungsian suatu lahan, dan perubahan struktur tata ruang Kota Padangsidempuan. Perbedaan tulisan ini adalah batasan temporal dan metode penelitian yang digunakan.

Skripsi “*Afdeeling* Padang Sidimpoean Tahun 1906-1942” karya Dendy Reza Juliansyah.²³ Skripsi ini merupakan kajian sejarah pemerintahan Kota Padangsidempuan pada masa Kolonial Belanda. Tulisan ini mengkaji perkembangan dan kondisi *Afdeeling* Padang Sidimpoean. Tulisan ini juga mendeskripsikan tata ruang kota Padangsidempuan pada masa kolonial. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis, yaitu pendekatan morfologi tidak digunakan dalam skripsi ini dan skripsi ini juga membahas sejarah kota kolonial, sedangkan penelitian penulis sejarah kota kontemporer.

Makalah berjudul “Morfologi Kota Medan” karya Julaihi Wahid,

²² M. Yani, “Kajian Pengaruh Pembangunan Jalan Lingkar Luar (*Outer Ring Road*) Terhadap Pola dan Struktur Ruang Kota Studi Kasus: Kota Padangsidempuan”, *Tesis* (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2013).

²³ Dendy Reza Juliansyah, “*Afdeeling* Padang Sidempoean Tahun 1906-1942”, *Skripsi* (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2021).

Bambang Karsono, dan Bhakti Alamsyah. Makalah ini mendeskripsikan morfologi kota Medan dari awal terbentuk hingga akhir masa kolonial. Makalah ini menganalisis bagaimana pengaruh *quarter system* (kebijakan pengelompokan populasi oleh Belanda) pada perkembangan struktur tata ruang Kota Medan. Makalah ini juga menjelaskan bagaimana perubahan pemerintah pasca kolonial yang tetap mengaplikasikan sistem yang dibuat oleh pemerintah kolonial.

Artikel berjudul “Studi Pola Morfologi Kecamatan Medan Helvetia” oleh Fitri Rahmawati Nasution.²⁴ Artikel ini membahas tentang struktur-struktur yang membentuk pola morfologi sebuah kota, ditinjau dari aspek penggunaan lahan/tata guna lahan, bentuk dan tipe bangunan, serta jaringan jalan yang berada di Kecamatan Medan Helvetia. Pada artikel ini, penulis menjelaskan penyebab terjadinya kemacetan dan banjir di kecamatan ini melalui analisis morfologi tersebut dan bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat di Kecamatan Medan Helvetia.

Buku dan karya ilmiah yang disebutkan dapat menjadi pedoman penulis untuk penelitian Perubahan Morfologi Kota Padangsidimpuan Sebelum dan Sesudah Menjadi Kota Otonom (1982-2012). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada adalah penelitian terkait morfologi Kota Padangsidimpuan belum dikaji. Penelitian tentang morfologi Kota Padangsidimpuan dengan perspektif sejarah juga belum ditemukan, sehingga sejauh yang diketahui penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu.

²⁴ Fitri Rahmawati Nasution, 2022, “Studi Pola Morfologi Kecamatan Medan Helvetia”, *Talenta*, Volume 5, No. 1, hlm. 66.

E. Kerangka Analisis

Tulisan ini berfokus pada perubahan morfologi Kota Padangsidimpuan selama tiga dekade, yaitu dari tahun 1982-2012. Tulisan ini termasuk kajian sejarah kota. Sartono Kartodirdjo menyatakan bahwa sejarah kota menggambarkan perkembangan kota sebagai pusat pemukiman yang memungkinkan berbagai aktivitas, seperti pelayanan, kemudahan, perdagangan, pemerintahan, seni, produksi, dan sebagainya.²⁵ Menurut Max Weber yang dikutip oleh Zulqaiyyim menyatakan bahwa perkembangan kota awalnya bermula sebagai suatu tempat yang berfungsi sebagai pertemuan orang dan terjadinya pertukaran barang atau informasi.²⁶ Perkembangan suatu kota juga menyangkut aspek-aspek politik, sosial, budaya, teknologi, ekonomi, dan fisik. Aspek yang berkaitan langsung dengan dengan penggunaan lahan kekotaan adalah perkembangan fisik atau struktur tata ruang kota atau morfologi kota.²⁷

Morfologi berasal dari dua suku kata, yaitu *morf* yang berarti bentuk dan *logos* yang berarti ilmu. Secara sederhana, morfologi adalah ilmu tentang bentuk. Secara lebih luas morfologi adalah *the science of form* (studi tentang bentuk), juga berarti sebagai *studies of the shape* (studi tentang bentuk), *form* (kondisi/bentuk), *external structure or arrangement* (struktur luar atau susunan), *especially as an object of study or classification* (terutama sebagai objek studi atau klasifikasi).²⁸

²⁵ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993), hal. 158.

²⁶ Zulqaiyyim, *Boekittingi Tempo Doeloe* (Padang: Andalas University Press, 2006), hlm. 3.

²⁷ Hadi Sabari Yunus, *op.cit.*, hlm. 107.

²⁸ *Oxford Dictionary Online* (diakses tanggal 21 Desember 2023).

Pernyataan Allain yang dikutip oleh Imam S. Ernawi menyatakan bahwa pemahaman tentang “morfologi kota” tidak dapat dilepaskan dari wujud fisik kota yang terbentuk utamanya oleh kondisi fisik-lingkungan maupun interaksi sosial-ekonomi masyarakat yang dinamis. Sebagai sebuah cabang ilmu geografi dan arsitektur, morfologi mempelajari perkembangan bentuk fisik di kawasan perkotaan, yang tidak hanya terkait dengan arsitektur bangunan, namun juga sistem sirkulasi, ruang terbuka, serta prasarana perkotaan (khususnya jalan sebagai pembentuk struktur ruang yang utama). Secara garis besar, wujud fisik kota tersebut merupakan manifestasi visual dan parsial yang dihasilkan dari interaksi komponen-komponen penting pembentuknya yang saling mempengaruhi satu sama lainnya.²⁹

Pernyataan Smailes yang dikutip oleh Hadi Sabari Yunus menyatakan bahwa morfologi memiliki unsur-unsur, yaitu, (1) unsur-unsur penggunaan lahan (*land use*); (2) pola-pola jalan (*street plan/lay out*) dan (3) tipe-tipe bangunan (*architectural style of building & their design*).³⁰ Dengan demikian, pendekatan morfologi kota (*urban morphological approach*) adalah suatu tinjauan penelitian kota yang ditekankan pada bentuk-bentuk fisik dari lingkungan kota. Hal ini dapat diamati dari kenampakan kota secara fisik atau areal.

Eko Alvares Zaidulfar mengutip pernyataan Rose mengungkapkan bahwa untuk mempelajari morfologi tidak hanya dengan melihat wujud fisik, tetapi harus mengaitkannya dengan ide-ide yang ada di balik bentuk, dan faktor-faktor yang

²⁹ Imam S. Ernawi, *Morfologi – Transformasi dalam Ruang Perkotaan yang Berkelanjutan* (Jakarta: Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum), hlm. 1.

³⁰ Hadi Sabari Yunus, *op.cit.*, hlm. 108.

telah mempengaruhi terjadinya ekspresi atau bentuk-bentuk kota tersebut.³¹ Faktor-faktor tersebut adalah manusia atau masyarakat kota setempat atau suatu pemerintahan kota. Kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi bagaimana suatu perkembangan kota yang terjadi, dikarenakan kebijakan tersebut menentukan arah dan prioritas pembangunan serta pengelolaan kota. Kebijakan ini mencakup aspek perencanaan tata ruang, infrastruktur, transportasi, ekonomi, dan ruang publik.

Perubahan morfologi terjadi dapat membentuk karakter Kota Padangsidempuan selama tiga dekade (1982-2012). Morfologi Kota Padangsidempuan pada masa Kota Administratif (1982-2001) menunjukkan perkembangan awal kota yang dilakukan oleh pemerintah Kota Administratif. Selanjutnya, morfologi Kota Padangsidempuan pada masa Kota Otonom (2001-2012) menunjukkan perubahan morfologi kota yang semakin maju dari pemerintahan sebelumnya. Perubahan morfologi yang terjadi dapat mengubah perilaku masyarakat. Dengan demikian, perubahan morfologi kota memiliki hubungan timbal-balik dengan masyarakat kotanya.

F. Metode Penelitian dan Bahan Sumber

Penelitian yang berjudul “Perubahan Morfologi Kota Padangsidempuan Sebelum dan Setelah Menjadi Daerah otonom (1982–2012)” merupakan penelitian Sejarah yang menggunakan Metode Sejarah. Tahapan metode sejarah adalah Heuristik, Kritik, Interpretasi, dan Historiografi.

³¹ Eko Alvares Zaidulfar, “Morfologi Kota Padang”, *Disertasi* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2002), hlm. 21.

Heuristik (Pengumpulan Sumber) adalah tahap awal penelitian sejarah. Tahap ini merupakan dasar rekonstruksi peristiwa sejarah. Sejarah adalah peristiwa yang sudah terjadi atau telah terjadi, dan kita tidak bisa melihat peristiwa tersebut secara langsung tanpa bantuan sumber-sumber.³² Sifat sumber sejarah ada dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

Sumber Primer (*Primary Courses*) adalah suatu sumber yang apabila sumber atau penulis sumber menyaksikan (*eye-witness*), mendengar (*ear-witness*), dan mengalami langsung (*the actor*) suatu peristiwa yang dituliskan dalam sumber tersebut.³³ Sumber primer merupakan sumber pokok atau asli atau sumber yang berasal dari tangan pertama. Sumber primer penelitian ini diantaranya Undang-Undang, peraturan daerah, peta, serta gambar yang didapat melalui *Instagram*, *Facebook*, *Youtube*, dan artikel *online*. Penulis memperoleh sumber primer melalui Badan Kearsipan dan Perpustakaan Kota Padangsidempuan, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padangsidempuan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padangsidempuan, juga di Kantor Wali Kota Padangsidempuan.

Sumber Primer penelitian ini juga didapatkan melalui wawancara. Wawancara adalah teknik untuk mendapatkan sumber lisan dalam pengumpulan sumber sejarah. Wawancara dilakukan kepada informan yang menjadi saksi dalam suatu peristiwa sejarah. Wawancara akan dilakukan dengan informan seperti, Walikota Padangsidempuan, pekerja di Badan Perencanaan Penelitian dan

³² Aditia Muara Padiatra, *Ilmu Sejarah Metode dan Praktik* (Gresik: JSI Press, 2020), (tanpa nomor halaman).

³³ Nina Herlina, *Metode Sejarah Edisi Revisi* (Bandung: Satya Historika, 2020), hlm. 24.

Pengembangan Daerah Kota Padangsidimpuan, pekerja di Badan Kearsipan dan Perpustakaan Kota Padangsidimpuan, pekerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padangsidimpuan, dan masyarakat yang bekerja dan terdampak dalam rentang tahun penelitian (1982-2012).

Sumber Sekunder adalah sumber yang telah diolah dari tangan pertama. Sumber sekunder merupakan tulisan sejarah dan penulisnya bukan saksi mata utama atau tidak hadir dalam peristiwa tersebut.³⁴ Sumber sekunder diperoleh melalui Studi Kepustakaan (*Library Research*). Penulis melakukan studi kepustakaan di Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, Ruang Baca Prodi Ilmu Sejarah, Perpustakaan Sutan Tagor Mulia Kota Padangsidimpuan, serta buku dan jurnal melalui situs *online*.

Kritik Sumber adalah tahapan selanjutnya dalam metode sejarah. Tahapan ini dilakukan untuk menguji dan menilai sumber-sumber yang telah didapatkan sebelumnya. Pada tahapan ini sumber diuji dengan kritik eksteren dan kritik interen. Kritik eksteren adalah kritik untuk menguji keaslian atau autentitas suatu sumber. Sumber diuji dengan meneliti kertas, tinta, gaya tulisan, bahasa, huruf, dan seluruh penampilan luar sumber.³⁵ Selanjutnya, kritik interen adalah kritik untuk menguji kredibilitas suatu sumber. Kritik interen menysasar substansi suatu sumber melalui analisa kronologi dan perbandingan benang merah sumber dengan fakta sejarah atau dengan sumber lainnya.³⁶

³⁴ Aditia Muara Padiatra, *op.cit.*, tanpa nomor halaman.

³⁵ Kuntowidjoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2018), hlm. 77.

³⁶ Aditia Muara Padiatra, *op.cit.*, (tidak memiliki nomor halaman).

Interpretasi adalah tahapan ketiga metode sejarah. Interpretasi dilakukan untuk memahami fakta sejarah dan menentukan hubungan fakta-fakta yang telah ada. Seluruh fakta sejarah akan diimajinasikan sesuai dengan konteks penelitian yang dilakukan. Pada tahapan ini akan ditemukan subjektivitas penulis. Oleh karena itu, subjektivitas dalam penulisan sejarah diakui, tetapi untuk dihindari dan diminimalisasi.³⁷

Historiografi adalah tahapan akhir penelitian sejarah. Historiografi adalah penulisan sejarah atau penulisan kisah maupun peristiwa pada masa tertentu dengan tahapan heuristik, kritik, dan interpretasi. Historiografi akan merekonstruksi seluruh fakta-fakta sejarah yang didapatkan. Pada tahapan ini, kemampuan menulis (*art of writing*) penulis sejarah akan diuji juga.³⁸ Hasil tulisan inilah yang disebut sebagai karya sejarah atau historiografi.

G. Sistematika Penulisan

Penyajian penulisan ini terdiri dari lima bab. Kelima bab tersebut memiliki hubungan satu sama lain dan merupakan satu kesatuan yang utuh. Penjelasan masing-masing dari kelima bab tersebut adalah sebagai berikut.

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan dan pengenalan terkait penelitian ini. Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka analisis, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Sebagai bab pendahuluan, bab ini ditujukan agar pembaca memahami penelitian ini.

³⁷ Kuntowidjoyo, *op.cit.*, hlm. 78.

³⁸ Nina Herlina, *op.cit.*, hlm. 30.

Bab kedua merupakan bab awal isi penelitian. Pada bab ini, penulis memaparkan sejarah Kota Padangsidempuan, yaitu asal-usul kota hingga pada masa kolonial. Kemudian, penulis memaparkan perubahan struktur Kota Padangsidempuan, sejak menjadi ibu kota Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Administratif Padangsidempuan, hingga menjadi Kota Otonom Padangsidempuan. Selain itu, penulis juga memaparkan dualism pemerintahan yang ada di Padangsidempuan pada awal pembentukan kota ini.

Bab ketiga memaparkan perubahan morfologi Kota Padangsidempuan dari tahun 1982-2012. Pada bab ini, penulis mendeskripsikan perubahan morfologi yang terjadi setelah perubahan struktur pemerintah kota. Penulis memaparkan bagaimana morfologi dan simbol kota, pembangunan fasilitas ekonomi kota, pembangunan jalan lingkar luar, hingga perubahan bentuk kota yang terjadi di Kota Padangsidempuan.

Selanjutnya, bab keempat memaparkan hubungan timbal balik perubahan morfologi Kota Padangsidempuan terhadap kondisi masyarakat. Pada bab ini, penulis memfokuskan dampak morfologi terhadap pertumbuhan jumlah penduduk, munculnya segregasi pemukiman di daerah kota, hingga perubahan penyebaran Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Padangsidempuan. Kemudian, pada bab kelima, penulis memaparkan kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang telah dilakukan.